

Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi Sebagian Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha

Rilda Murniati

*Fakultas Hukum
Universitas Lampung*

Abstrak : Dugaan kartel terjadi dengan adanya pengaturan harga dan produksi antar beberapa pelaku usaha pada bidang usaha dengan melakukan kesepakatan (kolusi) yang menguntungkan pelaku usaha dalam kelompok tersebut, menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar usaha tersebut, dan tercipta kenaikan harga barang yang menguntungkan para pelaku usaha yang melakukan kolusi tersebut. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kerjasama atau kesepakatan yang dilakukan para pelaku usaha menjadi kartel sebagai perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dan dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah merumuskan karakteristik kartel yang dilarang dan yang melanggar dalam hukum persaingan usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan sumber utama adalah data sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa suatu kartel adalah suatu kerjasama yang merugikan konsumen karena secara terang-terangan atau diam-diam para pelaku usaha berkolusi mengatur produksi, menetapkan (menaikkan) harga, membagi wilayah untuk memperoleh keuntungan yang di atas harga seharusnya jika produksi dan distribusi barang/jasa dilakukan dengan kompetisi secara sehat. Syarat utama terbentuknya dan berlaku kartel adalah adanya kolusi diantara pelaku usaha dengan jumlah terbatas dengan pasar yang terkonsentrasi, adanya hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha pesaing yang tidak ikut dalam kolusi, sifat barang bersifat homogen serta berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Terbentuknya kartel berdampak merugikan konsumen dengan terbatasnya pilihan atas barang dan harga barang tinggi yang pada akhirnya pelaku usaha yang ada di pasar adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kartel sehingga pasar terkonsentrasi dan melahirkan praktik monopoli yang dapat mematikan perekonomian suatu negara. Kartel dinyatakan melanggar dalam hukum persaingan usaha adalah dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 yaitu:

Key words: Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka.

Pelaku usaha kartel berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah,

sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Agar harga produk di pasar dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha, maka pelaku usaha membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih. Tujuannya adalah agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang, praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar. Kondisi ini terjadi sebagai tujuan dari praktik kartel untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena itu, kondisi kartel ini dapat menukar kompetisi dengan tindakan kolusif di antara pelaku usaha maka hal ini menjadi dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Praktik kartel terjadi antar para pelaku usaha yang berada dalam kelompok usaha yang sama dan mereka akan saling berkolusi untuk secara diam-diam terhadap kesepakatan mengurangi produksi, mengatur wilayah pemasaran dan menaikkan harga produknya di pasar. Untuk itu, KPPU sebagai lembaga berwenang harus senantiasa awas terhadap adanya praktik kartel yang melanggar dan faktanya lahir dari barang/produk tidak tersedia di pasar dan harga barang naik. Untuk menentukan praktik kartel yang dilakukan pelaku usaha tersebut melanggar oleh KPPU maka terdapat ukuran atau kriteria yang telah dirumuskan dan harus dibuktikan bahwa kolusi yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar dengan pembatasan produksi, pengaturan harga dan pembagian wilayah dapat

dikategorikan sebagai praktik kartel yang melanggar hukum persaingan usaha.

Penelitian mengenai kartel sebagai perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha penting untuk dikaji lebih secara teoritis sebagai batasan kriteria kartel yang dilarang dan kartel yang melanggar akibat dipenuhinya unsur-unsur rumusan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) sehingga berdampak yang sangat merugikan konsumen dan mematikan persaingan sehat dalam usaha. Untuk itu, judul penelitian ini adalah “Kartel: Kolusi Pengaturan Harga dan Produksi sebagai Perjanjian yang Dilarang dan Melanggar dalam Hukum Persaingan Usaha”

METODOLOGI

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data *time series* dari tahun 2008-2013 serta data

1. **Indeks Hoover Balassa**, untuk menganalisis titik konsentrasi spasial industri manufaktur. Indeks Balassa digunakan untuk menghitung aglomerasi, kekhususan indeks ini adalah dapat digunakan untuk membedakan faktor spesialisasi dimana disini diwakili oleh tenaga kerja.

Adapun rumus indeks Balassa sebagai berikut :

Indeks Balassa =

$$\frac{\sum_{ij} E_{ij}}{\frac{\sum_j E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}}}$$

Dimana :

i = Sektor

E = Tenaga Kerja

j = Kabupaten

J = Provinsi

Pembilang dari indeks ini menyajikan bagian wilayah dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur, Semakin terpusat suatu industri, semakin besar indeks Balassanya, Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa diatas 4, rata - rata atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai satu berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi, (Sbergami, 2010).

2. Analisis Data Panel

Regresi data panel digunakan untuk menjawab tujuan kedua dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur di Jawa Barat. Data panel (*panel data*) merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu.

Adapun spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Ag = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{TKSI}_{it} + \beta_2 \ln \text{UMK}_{it} + \beta_3 \ln \text{JLN}_{it} + \varepsilon$$

Tabel 4. Indeks Ballasa Kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Barat (%)
Tahun 2008 -2013

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.559669	0.331927	1.686123	0.0942
LN_TKSI	0.135575	0.014267	9.502821	0.0000
LN_UMK	-0.083760	0.019619	-4.269344	0.0000
LN_JLN	0.029896	0.010855	2.753955	0.0068
R²		0.967980		
F-statistics		136.0357		

Sumber : data diolah

Dimana :

Ag = Aglomerasi kabupaten/kota i pada tahun t

β_0 = Koefisien intersep yang merupakan skala

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien slope atau kemiringan

lnTKSI = log natural Tenaga Kerja Sektor Industri

kabupaten/kota i pada tahun t

lnUMK = log natural Upah Minimum

Kabupaten/Kota i pada tahun t

lnJLN = ln Panjang Jalan Kabupaten/Kota i pada

tahun t

ε_t = Error term

i = 1,2,...,n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross section*)

t = 1,2,...,t, menunjukkan dimensi runtun waktu (*time series*)

PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki industri manufaktur besar dan sedang paling tinggi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal itu didasari oleh perhitungan dengan menggunakan indeks balassa untuk mengetahui terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan hasil dari perhitungan menggunakan Indeks Ballasaa.

Berdasarkan Tabel 4 menyatakan bahwa aglomerasi terjadi di Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan kriteria terjadi atau tidaknya suatu aglomerasi:

- Indeks ballasa > 4 = aglomerasi dikatakan kuat
- Indeks ballasa 2- 4 = aglomerasi dikatakan sedang
- Indeks ballasa 1-2 = aglomerasi dikatakan lemah
- Indeks ballasa 0 = aglomerasi tidak terjadi

Berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi syarat terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat dalam tingkatan > 4 adalah Kota Cimahi 4,67.

Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, proses selanjutnya adalah melakukan estimasi model panel data dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Sesuai dengan hasil uji spesifikasi Chow dan Hausman, dalam penelitian ini persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 5. Hasil Estimasi Panel Data dengan Pendekatan *Fixed Effect Model*

No	Kabupaten/kota	Tingkat Aglomerasi
1	Bogor	1,332,115
2	Sukabumi	1,227,287
3	Cianjur	0,169464
4	Bandung	1,710,624
5	Garut	0,220905
6	Tasikmalaya	0,054179
7	Ciamis	0,100259
8	Kuningan	0,07307
9	Cirebon	0,517545
10	Majalengka	0,579094
11	Sumedang	0,670178
12	Indramayu	0,112127

13	Subang	0,344919
14	Purwakarta	2,122,258
15	Karawang	2,032,311
16	Bekasi	2,925,633
17	Bandung Barat	0,788234
18	Kota Bogor	0,722455
19	Kota Sukabumi	0,385204
20	Kota Bandung	1,162,273
21	Kota Cirebon	0,514808
22	Kota Bekasi	0,742923
23	Kota Depok	0,577669
24	Kota Cimahi	4,670,107
25	Kota Tasikmalaya	0,332857
26	Kota Banjar	0,628213

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 8, maka dapat ditulis persamaan regresi:

$$Ag_{ti} = 0.559669 + 0.135575 \ln TKSI_{t,i} - 0.083760 \ln UMK_{t,i} + 0.029896 \ln JLN_{t,i}$$

Nilai koefisien regresi tenaga kerja sektor industri adalah sebesar 0.135575 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap kenaikan penyerapan tenaga kerja sektor industri sebesar 1% maka akan meningkatkan Aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,13 % *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa tenaga kerja sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya aglomerasi di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Purnomo, 2014) yang menyatakan bahwa Pemusatan industri dapat terjadi di suatu lokasi karena terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Misalnya, bahan – bahan mentah, tenaga kerja, energi, pasar, izin mendirikan usaha, pajak yang lebih murah, penanggulangan limbah industri. Sehingga hal ini juga sesuai pada teori lokasi

Nilai koefisien regresi upah minimum Kabupaten/kota adalah sebesar -0.083760

dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap meningkatnya tingkat upah minimum Kabupaten/kota sebesar 1% maka akan berdampak pada menurunnya aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,083 % *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya aglomerasi di Jawa Barat. Bila dipandang melalui teori lokasi Weber yang menempatkan faktor biaya tenaga kerja sebagai faktor dominan dalam penentuan lokasi industri di samping biaya transportasi. Hasil yang diperoleh juga sesuai dengan teori lokasi, hipotesis teori lokasi menyatakan bahwa sebuah pabrik akan memilih berlokasi di daerah dengan tingkat upah yang rendah untuk meminimumkan biaya produksi (Purwaningsih, 2011).

Nilai koefisien regresi infrastruktur jalan adalah sebesar 0.029896 dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap meningkatnya kondisi infrastruktur jalan sebesar 1% maka akan berdampak pada terjadinya aglomerasi di Jawa Barat sebesar 0,029% *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa infrastruktur jalan Kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Aglomerasi di Jawa Barat. Panjang jalan mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian. Distribusi faktor produksi maupun barang dan jasa hasil produksi sangat tergantung dari keberadaan infrastruktur jalan. Secara spasial, mobilitas manusia dan hasil produksi ini menentukan kemajuan suatu wilayah karena interaksi dan keterbukaan dengan wilayah lain meningkatkan pangsa pasar baik faktor produksi maupun hasil produksi (purwaningsih, 2011). Teori Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri

tergantung pada biaya transportasi dalam hal ini kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap terjadinya aglomerasi industri.

Tabel 6. Nilai Koefisien *Fixed Effect* Pada Masing-Masing kabupaten/kota di Povinsi Jawa Barat

Fixed Effect (Cross)	Koefisien	Individual Effect
Bogor	0.083524	0.643193
Sukabumi	0.063078	0.622747
Cianjur	-0.692006	-6.132337
Bandung	0.482920	1,042,589
Garut	-0.72315	-0.163481
Tasikmalaya	-0.643794	-0.084125
Ciamis	-0.682523	-0.122854
Kuningan	-0.592154	-0.122854
Cirebon	-0.500816	0.058853
Majalengka	-0.40593	0.153739
Sumedang	-0.280482	0.279187
Indramayu	-0.66831	1,227,979
Subang	-0.590654	1.042589
Purwakarta	1.103180	1.662.849
Karawang	0.811784	1.371.453
Bekasi	1.661718	2.221.387
Bandung Barat	-0.184001	0.375668
Kota Bogor	-0.215705	0.343964
Kota Sukabumi	-0.283195	0.276474
Kota Bandung	0.009366	0.569035
Kota Cirebon	-0.229142	0.330527
Kota Bekasi	-0.301209	0,25846
Kota Depok	-0.378845	0,180824
Kota Cimahi	3.603649	4.163.318
Kota Tasikmalaya	-0.454148	0,105521
Kota Banjar	-0.060809	0.49886

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 5, terdapat nilai *individual effect* pada masing-masing kabupaten/kota di Povinsi Jawa Barat. Kota Cimahi merupakan kabupaten dengan *individual effect* terbesar dan Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten dengan *individual effect* terkecil. Berikut

merupakan analisis intersep model regresi *fixed effect* :

1. Jika ada perubahan tenaga kerja sektor industri, umk, dan jalan baik antar daerah maupun antar waktu, maka Kota Cimahi akan mendapatkan pengaruh sebesar 4,1 % terhadap aglomerasi Provinsi Jawa Barat.
2. Jika ada perubahan tenaga kerja sektor industri, umk, dan jalan baik antar daerah maupun antar waktu, maka dengan individual effect yang paling rendah dan berarti tidak terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil estimasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien intersep aglomerasi dari setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai berbeda. Adanya perbedaan nilai koefisien intersep tersebut dimungkinkan karena daerah yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nilai koefisien intersep ini menunjukkan perbedaan perilaku dari masing-masing daerah. Daerah yang memiliki koefisien intersep yang positif menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai aglomerasi lebih tinggi dibanding daerah lain. Sedangkan daerah yang memiliki koefisien intersep yang negatif memiliki aglomerasi yang lebih rendah dibanding daerah lain.

Faktor yang mempengaruhi bahwa relatif rendahnya aglomerasi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dibandingkan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat adalah masih terbatasnya infrastruktur di masing-masing Kabupaten/kota, perbedaan biaya upah dan terbatasnya tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Indeks Ballasaa tahun 2008 – 2013 menyatakan bahwa terjadi aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 1 Kota yang memenuhi kriteria perhitungan indeks ballasa yaitu Kota Cimahi.
2. Tenaga Kerja Sektor Industri dan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan hipotesis dan teori lokasi yaitu bahwa Pemusatan industri dapat terjadi di suatu lokasi karena terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, salah satunya tenaga kerja dan infrastruktur. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan hipotesis dan teori lokasi yang dikemukakan oleh weber. Secara bersama-sama variabel Tenaga Kerja Sektor Industri (TKSI), Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Infrastruktur Jalan (JLN) berpengaruh terhadap terjadinya aglomerasi industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.

Saran

Pentingnya bagi suatu daerah untuk dapat menjadi pusat aglomerasi karena selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya juga dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian diharapkan perekonomian daerah sekitarnya juga bisa ikut tumbuh dengan

banyaknya tenaga kerja yang diserap khususnya sektor industri. Dalam rangka pemerataan pembangunan maka perlu adanya pemerataan fasilitas infrastruktur dan pendirian industri industri baru di daerah-daerah yang memiliki potensi. Dalam jangka panjang interkoneksi berbagai infrastruktur tersebut secara meluas akan memberikan potensi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan jika terpusat.

DAFTAR PUSTKA

- Badan Pusat Statistika. 2008-2013. *Jawa Barat Dalam Angka 2013*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons LTD. London.
- Capello, R. 2007. *Regional Economics*. Routledge, New York.
- Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat 2013. *Upah minimum kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat*.
- Fujita dan J.F thisse,1996 Fujita, M., dan J.F. Thisse,1996. "The Economics of Agglomeration." *Journal of Japanese and International Economics*.
- Fujita, M. and T. Mori. 1996. The Role of Ports in Making of Major Cities: Self Agglomeration and Hub-Effect. *Journal of Development Economics*. Vol. 49 : 93-120
- Fujita, M., P. Krugman, dan A.J. Venables. 1999. *The Spasial Economics: Cities, Regional and International Trade*. The MIT Press, Cambridge and London.
- Gujarati,DamodarN.2004.*BasicEconometric*, JohnWilley&Sons,Fourth Edition. New York.
- Hayter,2000 Hayter,R.2000. *The Dynamic of industrial Location: The Factory, the Firm and The Production System*. Chichester : John Wiley & Sons
- Hilmiyah,Widyah.2013.*AnalisisKonsentrasi spasial & pengembangan kawasan industri di Kab. Gresik*. Jurnal Ekonomi Pembangunan *Indikator Tenaga KerjaProvinsi Jawa Barat* 2013. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Jabal,Gilang.2014. *Analisis Aglomerasi di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Jannifer,Shandy.2010. *Analisis pengaruh Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur terhadap Pertumbuhan dengan Ketimpangan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Krugman, P. 1998. Space: the Final Frontier. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 12(2): 161-174.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro,Mudrajad.2002. *Analisis Spasial Dan Regional*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Martin dan octavianno 2001. *Dinamika Aglomerasi di Jawa, Tahun 2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Matitaputty.2010. *Analisis Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Dengan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 1994-2007*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- McCann, P. 2006. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press. Oxford Inc. New York.

- Mudrajad,2002 Kuncoro, Mudrajat. 2002.
Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Nuryadin.2007. *Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi : Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Sakti.2007. *Analisis Aglomerasi dan Faktor yang Mempengaruhi Terkonsentrasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Pulau Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,Vol.22 No.1,Yogyakarta